

**ANALISIS KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH
TERJADINYA COVID-19 DI KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Mendapat Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Jurusan Ekonomi Pembangunan*



Oleh :

Nama : Herlambang Syahputra
NPM : 1705180031
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mughtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata -I Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Selasa, 21 Mei 2024, pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MEMUTUSKAN

NAMA : HELAMBANG SAPUTRA
N P M : 1705180031
PROGRAM STUDI : EKONOMI PEMBANGUNAN
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA COVID 19 DI KOTA MEDAN

DINYATAKAN : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dra. ROSWITA HAFNI, M.Si.)

Penguji II

(HASTINA FEBRIATY, S.E., M.Si.)

Pembimbing

(SRI ENDANG RAHAYU, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

(Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA)

Sekretaris

(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HERLAMBANG SAPUTRA

NPM : 1705180031

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Alamat Rumah : Jl. MARELAN RAYA PASAR 2 BARAT LINGKUNGAN 17
GG MASJID AL IMAM LORONG PERSATUAN

Judul : ANALISIS KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH
TERJADINYA COVID 19 DI KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian
mempertahankan skripsi.

Medan, April 2024

Pembimbing Skripsi

SRI ENDANG RAHAYU, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



Dr. H. JANURI, SE., MM., M.Si, CMA



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERLAMBANG SAPUTRA

NPM : 1705180031

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

**Judul Skripsi : ANALISIS KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH
TERJADINYA COVID 19 DI KOTA MEDAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil Plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Saya yang menyatakan

HERLAMBANG SAPUTRA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	9
1.3. Rumusan Masalah.....	9
1.4. Tujuan.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	10
1.5.1. Manfaat Akademik.....	10
1.5.2. Manfaat Non Akademik.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Landasan Teori.....	11
2.1.1. Kemiskinan.....	11
2.1.3. Pengeluaran Pemerintah.....	20
2.2. Penelitian Terdahulu.....	25
2.3. Tahapan Penelitian.....	27
2.4. Kerangka Konseptual.....	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Pendekatan Penelitian.....	28
3.2. Tempat dan Waktu Penelitian.....	28
3.2.1. Tempat Penelitian.....	28
3.2.2. Waktu Penelitian.....	28
3.3. Jenis dan Sumber Data.....	28
3.4. Populasi dan Sampel.....	29
3.4.1 Populasi.....	29
3.4.2 Sampel.....	29

3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.6. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1. Gambaran Umum.....	31
4.1.1. Kondisi Geografi	31
4.1.2. Kondisi Demografi	32
4.2. Tingkat Kemiskinan Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Covid-19 Di Kota Medan.....	33
4.3. Perkembangan program pemulihan ekonomi di kota Medan pasca pandemic covid-19	36
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	46
5.1. Kesimpulan	46
5.2. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017 - 2021	5
Tabel 1 2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Kota Medan, 2020	8
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	10.
Tabel 4.1 Luas Kecamatan Kota Medan	31
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2020	32
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017 - 2023	34
Tabel 4.4 Belanja Bantuan Sosial Kota Meda Tahun 2018-2022 (Miliar)	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Kerangka Alur Tahapan Penelitian	27
Gambar 2 2 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Bantuan Sosial Sudah merata.....	39
Gambar 4.2 Kepuasan dengan yang diterima.....	41
Gambar 4.3 Bantuan Sosial Meringankan Beban Masyarakat.....	42
Gambar 4.4 Ketepatan Waktu Dalam Penyaluran	43

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif tingkat kemiskinan sebelum dan setelah pandemi COVID-19 di Kota Medan, serta mengkaji perkembangan program pemulihan ekonomi pasca pandemi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif kuantitatif. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin di Kota Medan adalah 204.22 ribu jiwa, menurun menjadi 183.54 ribu jiwa pada tahun 2020. Namun, dampak pandemi COVID-19 dan pembatasan ekonomi pada tahun 2021 meningkatkan kembali jumlah penduduk miskin menjadi 193.03 ribu jiwa. Hal ini menunjukkan dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap perekonomian dan kemiskinan Kota Medan. Pada tahun 2022-2023, angka kemiskinan kembali turun menjadi 187.28 ribu jiwa. Implementasi Bantuan Sosial selama pandemi di Kota Medan dinilai cukup efektif, meskipun terdapat ketidakpuasan terkait alokasi bantuan yang belum merata. Abstrak ini menyajikan analisis ekonomi yang sistematis terhadap kondisi kemiskinan dan pemulihan ekonomi di Kota Medan pasca pandemi.

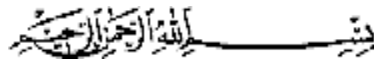
Kata kunci: kemiskinan, pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi, Kota Medan, bantuan sosial

ABSTRACT

This study aims to conduct a descriptive analysis of poverty levels before and after the COVID-19 pandemic in Medan City, and to assess the development of post-pandemic economic recovery programs. The research method employed is a quantitative descriptive study. In 2017, the number of impoverished residents in Medan City was 204,220, which decreased to 183,540 in 2020. However, the impact of the COVID-19 pandemic and economic restrictions in 2021 led to an increase in the number of impoverished residents to 193,030. This indicates a significant impact of the COVID-19 pandemic on the economy and poverty in Medan City. By 2022-2023, the poverty rate decreased again to 187,280. The implementation of Social Assistance during the pandemic in Medan City was deemed fairly effective, although dissatisfaction persists regarding the uneven distribution of aid. This abstract presents a systematic economic analysis of poverty conditions and economic recovery in Medan City post-pandemic.

Keywords: poverty, COVID-19 pandemic, economic recovery, Medan City, social assistance

KATA PENGANTAR



Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul “**ANALISIS KEMISKINAN SEBELUM DAN SESUDAH TERJADINYA COVID-19 DI KOTA MEDAN**”

shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita keluar dari zaman kegelapan menuju era pengetahuan yang maju seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana (S-1) di Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama proses penyusunan proposal ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan doa yang tak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **ALLAH SWT** yang telah memberikan Rahmat serta, Rezky-Nya yang luar biasa serta nikmat Iman dan nikmat Kesehatan kepada penulis. Dan atas izin-Nya yang memberikan kesempatan kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayah dan Bunda yang telah memberikan segala kasih sayang, do'a, perhatian, pengorbanan dan semangat kepada penulis.

3. Bapak Dr. H. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, SE., M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan SE., M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung SE., M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S., SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dra. Roswita Hafni., M.Si selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu Dr. Prawidya Hariani R.S., SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam masalah perkuliahan..
10. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Seluruh Staff/Pegawai Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.

Penulis juga mengundang semua pihak yang telah membaca proposal ini untuk memberikan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa depan dan untuk penyempurnaan proposal ini ke depannya. Semoga proposal ini dapat menjadi tambahan pengetahuan, terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Terakhir, penulis berharap agar proposal ini bermanfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang telah diberikan

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2024

Herlambang Syahputra
1705180031

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

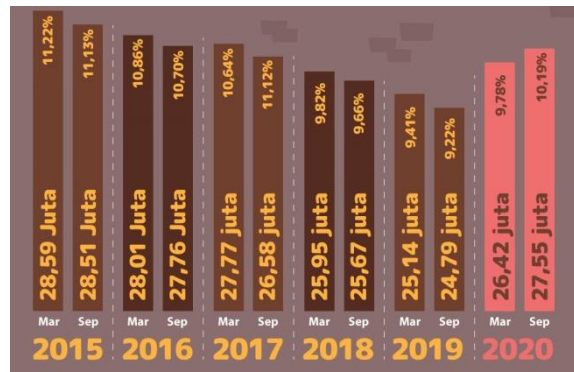
Penyakit Coronavirus (Covid-19) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Covid-19 (Coronavirus Disease 2019) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru dari coronavirus, Sars-CoV-2, yang pertama kali dilaporkan pada tanggal 31 Desember 2019 di Wuhan, China. Hadirnya pandemi COVID-19 telah membawa perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia, COVID-19 telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020, setidaknya 35.000 orang telah meninggal dunia (Sumarni, 2020). Penyebaran kasus wabah Covid-19 memberikan dampak efek domino untuk seluruh bidang. yang bermula dari permasalahan kesehatan ke permasalahan sosial, ekonomi, serta politik (Susantyo et al., 2020).

Pandemi ini mulai menjadi masalah global dan sehingga telah membuat setiap negara mengupayakan untuk mencari cara pencegahannya agar dapat menahan lajunya angka pasien positif, seperti membentuk tim satuan tugas penanggulangan Covid-19 hingga memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (Nasrah & Muafiah, 2020). Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus COVID-19 juga telah menghambat kegiatan perekonomian dan dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan sosial semakin dirasakan masyarakat (Nurhidayat, 2020). Setelah menunjukkan pencapaian penurunan kemiskinan beberapa tahun belakangan ini, tingkat kemiskinan kembali meningkat setelah

pandemi COVID-19 . Satu dari 10 orang di Indonesia hari ini hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Tingkat kemiskinan juga dapat meningkat secara signifikan.

Ketidakstabilan kondisi ekonomi akibat pandemi Covid-19 semakin terasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya rumah tangga. Konsumsi rumah tangga yang menjadi andalan perekonomian melambat signifikan, yang pada akhirnya mempengaruhi output ekonomi. Rumah tangga Indonesia yang terkena dampaknya memiliki dua sisi sekaligus, yakni pendapatan yang menyusut dan ruang konsumsi yang terbatas. Penurunan penjualan disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan upah dan penurunan laba usaha. Akibat penurunan pendapatan tersebut, pengeluaran konsumsi masyarakat juga turun akibat melemahnya daya beli. Sementara itu, ruang konsumsi yang terbatas antara lain disebabkan oleh adanya pembatasan mobilitas masyarakat.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan pemerintah sangat merugikan pekerja di sektor informal. Para pekerja ini biasanya bergantung pada penghasilan harian atau upah, namun kesulitan mendapatkan pendapatan karena menurunnya aktivitas ekonomi akibat PSBB. Bukan hanya itu, banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan karena operasi bisnis dihentikan. Dampaknya, tingkat kemiskinan meningkat karena sebagian besar dari mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu atau miskin berada di sektor informal dan kini mereka berada dalam kondisi yang semakin sulit



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Grafik 1 1 Angka Kemiskinan di Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat di tengah pandemi Covid-19. Hingga September 2020, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin pada September bertambah 1,13 juta dibandingkan dengan Maret 2020. Jika dibandingkan dengan September 2019, jumlah penduduk miskin naik 2,76 juta orang. Sedangkan, kalau dibandingkan September 2019 ke September 2020, persentase penduduk miskin meningkat dari 9,22% menjadi 10,19%. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. Pada tahun 2012 kemiskinan di Indonesia berada di angka 29,25 juta.

Kota Medan, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia yang juga terdampak secara langsung oleh pandemi COVID-19. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kata Data pada bulan Oktober 2022, Kota Medan menduduki peringkat teratas dengan tingkat konfirmasi positif COVID-19 mingguan tertinggi, mencapai 3,99 kasus per 100 ribu penduduk per minggu.

Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Kota Medan. Pembatasan aktivitas ekonomi yang diberlakukan secara besar-besaran telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi yang berujung pada peningkatan angka pengangguran di kota ini, terutama di sektor industri. Konsekuensinya, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan, menambah jumlah pengangguran di Kota Medan. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 juga mengakibatkan penurunan pendapatan bagi banyak individu karena pembatasan aktivitas ekonomi, yang pada gilirannya menurunkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan. Akibatnya, tingkat kesejahteraan masyarakat juga mengalami penurunan.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2022

Grafik 1 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan 2017 - 2021

Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Medan mengalami peningkatan sebesar 2,62 persen pada tahun 2021, berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya yang mengalami kontraksi sebesar -1,98 persen pada tahun 2020. Kontraksi pertumbuhan ekonomi tersebut terjadi karena adanya pembatasan yang signifikan yang diberlakukan pemerintah untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Pembatasan ini berdampak pada terbatasnya aktivitas ekonomi di Kota Medan. Penurunan pertumbuhan ekonomi tersebut juga

mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan di kota ini. Berikut ini adalah data terkait tingkat kemiskinan di Kota Medan.

Tabel 1 1 Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017 - 2021

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan (000) (Jiwa)					
	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Sumatera Utara	1 268,19	1 343.86	1 283.29	1 282.04	1 324.98	1 453.87
Medan	187,74	193.03	183.54	183.79	186.45	204.22

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2022

Data yang tertera menunjukkan fluktuasi jumlah penduduk miskin di Kota Medan dan Sumatera Utara dari tahun 2017 hingga 2022. Fokus pada Kota Medan menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, menurun dari 193.03 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 187.74 ribu jiwa pada tahun 2022. Terkait dengan pandemi COVID-19, pada tahun 2020, ketika pandemi pertama kali muncul, terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Medan, seiring dengan diberlakukannya pembatasan ekonomi yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau pendapatan. Namun, pada tahun 2022, meskipun pandemi masih berlangsung, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin, yang mungkin disebabkan oleh adanya pemulihan sebagian dalam aktivitas ekonomi dan peluncuran program bantuan sosial dan stimulus ekonomi. Perbandingan dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara menunjukkan bahwa Kota Medan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif lebih rendah, menunjukkan potensi untuk pemulihan ekonomi yang lebih cepat atau mendapat manfaat dari kebijakan khusus yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, data menegaskan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Medan, tetapi juga mengindikasikan potensi untuk pemulihan ekonomi melalui upaya mitigasi yang tepat.

Kemiskinan dapat dijelaskan sebagai suatu keadaan di mana individu atau kelompok tidak memiliki harta benda yang cukup dan memiliki penghasilan rendah yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti pangan, sandang, dan papan. Menurut World Bank, kemiskinan adalah "keadaan di mana seseorang tidak memiliki akses atau tidak mampu memperoleh aspek-aspek dasar kehidupan seperti makanan, air bersih, perawatan kesehatan, pendidikan, dan tempat tinggal yang layak" (*World Bank, "Poverty Overview"*). Hal ini menyoroti bahwa kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan esensial untuk hidup yang layak. Dalam konteks ini, kemiskinan dapat menciptakan ketidaksetaraan sosial, membatasi kesempatan hidup yang adil, dan menyebabkan dampak yang berkelanjutan terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa definisi menggambarkan keadaan ini. Salah satunya adalah definisi kemiskinan yang digunakan oleh BPS, yang menggambarkan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup secara layak (Bhinadi, 2017).

Dengan hilangnya mata pencaharian membuat banyak masyarakat yang mengalami penurunan bahkan kehilangan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika kita lihat dari UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, disebutkan bahwa "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya material, spiritual dan sosial warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya." Dalam pasal tersebut, aspek material menjadi syarat utama seseorang dapat disebut dengan

sejahtera, dengan tercukupinya aspek material atau ekonomi yang baik, dengan begitu aspek kehidupan lainnya pun dapat berjalan dengan baik pula.

Dalam menghadapi peningkatan angka kemiskinan yang disebabkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program bantuan untuk membantu masyarakat rentan yang terdampak, terutama di Kota Medan. Program-program ini dirancang dengan tujuan utama untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, baik dalam bentuk tunai maupun non tunai, dengan harapan dapat mengatasi berbagai permasalahan kesejahteraan masyarakat yang dihadapi akibat pandemi. Tujuan dari program bantuan sosial ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperkuat jaringan pengaman sosial, serta mendorong pemulihan ekonomi di tengah-tengah kondisi yang sulit akibat pandemi Covid-19. Melalui program-program ini, diharapkan dapat memberikan bantuan yang signifikan bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi, sehingga dapat membantu mereka melewati masa sulit ini dengan lebih baik. (Akib & Risfaisal, 2015).

Bantuan sosial memegang peran yang sangat vital dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbaiki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang kurang mampu (Pratama & Utama, 2019). Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab utama untuk memberikan perlindungan sosial kepada warga negara, khususnya mereka yang berada dalam garis kemiskinan. Di tengah pandemi Covid-19 yang melanda saat ini, berbagai jenis program bantuan sosial telah diinisiasi sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk merespons dan menangani dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan. Program-program tersebut

mencakup bantuan sosial sembako, kartu prakerja, program Keluarga Harapan, bantuan sosial tunai, serta subsidi listrik. Dengan melakukan campur tangan dalam bentuk program-program ini, pemerintah berupaya secara langsung untuk mengurangi beban ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang rentan terhadap dampak pandemi. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya peningkatan angka kemiskinan yang signifikan serta memperkuat daya tahan sosial ekonomi masyarakat dalam menghadapi tantangan yang dihadapi akibat pandemi Covid-19.

Tabel 1 2 Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan Anggaran Bantuan Sosial Kota Medan, 2020

Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM)		Jumlah Anggaran (rupiah)	
	Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
Kota				
Medan	88 539	79 742	17 707 800 000	15 948 400 000
Sumatera Utara	762 002	769 342	152 400 400 000	153 868 400 000

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020

Dari data diatas menunjukkan bahwa realisasi anggaran Bantuan Sosial di Kota medan mencapai angka Rp. 15.948.400.000 dengan jumlah keluarga penerima manfaat sebesar 79.742. Program bantuan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang terdampak covid-19 sehingga seluruh masyarakat terdampak akan terbantu. Akan tetapi, apabila kita lihat dari rencana alokasi, realisasi jumlah keluarga penerima manfaat dan realisasi anggaran masih dibawah rencana yang telah ditetapkan. Artinya, masih terdapat sebagian masyarakat yang terdampak belum menerima manfaat bantuan sosial dari pemerintah tersebut. Teja (2020) mengemukakan ketidaktepatan sesuatu yang menjadi tujuan penerima bantuan sosial dapat menjadi persoalan yang selalu sering timbul saat bantuan sosial

didistribusikan oleh pemerintah. Tidak hanya itu, ditemukan juga tumpang tindih dari program bantuan sosial Covid-19 tersebut yang diterbitkan pemerintah sehingga dapat mengakibatkan ketidak teraturan dalam pelaksanaan program bantuan social tersebut. Proses penyaluran bantuan sosial pun masih dapat dirasakan belum optimal sampai ke tangan masyarakat, dikarenakan metode pendukung ketetapan yang masih samar dan juga ketidaksiapan dari pihak pemerintah. Permasalahan tersebut yang menyebabkan penyaluran bantuan sosial menjadi kurang efektif bahkan tidak efektif sampai ke tangan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena latarb elakang diatas, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan menganalisa dengan judul “Analisis Kemiskinan Sebelum dan Sesudah Terjadinya Covid-19 di Kota Medan”

1.2. Identifikasi Masalah

1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Medan mengalami pertumbuhan minus pada tahun 2020
2. Kemiskinan di Kota Medan mengalami peningkatan dari tahun 2020-2021
3. Realisasi bantuan sosial kepada masyarakat tidak mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah terjadinya covid-19 di kota Medan
2. Bagaimana perkembangan program pemulihan ekonomi di kota Medan pasca pandemic covid-19

1.4. Tujuan

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif mengenai tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah covid-19 di kota Medan.
2. Melakukan analisis ekonomi deskriptif mengenai perkembangan program pemulihan ekonomi di kota Medan pasca pandemic covid-19

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Akademik

a. Bagi Peneliti

- 1) Sebagai bahan studi atau tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian menyangkut topik yang sama.
- 2) Sebagai tambahan literatur terhadap penelitian sebelumnya.

b. Bagi Mahasiswa

- 1) Melatih mahasiswa untuk dapat menguraikan dan membahas suatu permasalahan secara ilmiah, teoritis, dan sistematis.
- 2) Sebagai tambahan pembelajaran bagi mahasiswa mengenai pembahasan yang terkait.

1.5.2. Manfaat Non Akademik

- a. Sebagai bahan masukan dalam penetapan kebijakan pemerintah.
- b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambahan pengetahuan bagi masyarakat

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat di suatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Kemampuan pendapatan yang rendah ini juga akan berdampak berkurangnya kemampuan untuk memenuhi standar hidup rata-rata seperti standar kesehatan masyarakat dan standar pendidikan (Subandi, 2014).

Menurut Arsyad (2010) kemiskinan itu bersifat multi dimensional. Artinya karena kebutuhan manusia itu bermacam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Jika kita melihat dari perspektif kebijakan umum, kemiskinan meliputi dua aspek utama, yaitu aspek primer dan aspek sekunder. Aspek primer melibatkan kekurangan sumber daya esensial seperti pangan, sandang, dan papan, sementara aspek sekunder mencakup ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mengakses jaringan sosial, sumber daya keuangan, dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan ini tercermin dalam berbagai bentuk kekurangan, seperti kekurangan gizi, kurangnya akses air bersih dan perumahan yang layak, kualitas perawatan kesehatan yang buruk, serta tingkat pendidikan yang rendah. Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan ekonomi semata, tetapi juga sebagai kondisi yang mempengaruhi keseluruhan kesejahteraan dan kehidupan individu atau kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Oleh

karena itu, upaya untuk mengatasi kemiskinan tidak hanya memerlukan intervensi ekonomi, tetapi juga intervensi yang bersifat holistik dan menyeluruh.

Kemiskinan adalah sebuah istilah yang merujuk pada kondisi kurangnya kebahagiaan dan kepuasan dalam kehidupan, serta kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan dasar yang tidak dapat dibandingkan dengan standar yang dianggap memadai (Safri, 2018). Definisi kemiskinan mencakup berbagai dimensi, termasuk hilangnya kemampuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental, serta ketidakmampuan dalam mengakses sumber daya dan peluang pembangunan. Situasi ekonomi yang terkait dengan kemiskinan sering kali menggambarkan keterbatasan dalam pilihan dan peluang yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memperoleh sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi hidup mereka. Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya sekadar masalah ekonomi, tetapi juga merupakan masalah sosial yang kompleks yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan di suatu Negara, diperlukan pemahaman pengertian kemiskinan. Oleh sebab itu, BPS membuat standar kemiskinan antara lain:

- a. Tidak miskin, adalah mereka yang memiliki pengeluaran per orang per bulan $>$ Rp. 350.610.
- b. Hampir tidak miskin, pengeluaran per bulan per orang antara Rp. 280.488- Rp. 350.610.
- c. Hampir miskin, pengeluaran per bulan per orang Rp. 233.740 - Rp.280.488.

- d. Miskin, pengeluaran per orang per bulan < Rp. 233.740.
5. Sangat miskin, pengeluaran per orang per bulan tidak diketahui secara pasti

Kriteria kemiskinan tersebut menyoroti fakta bahwa jumlah keluarga yang terjerat dalam kemiskinan di Indonesia masih cukup signifikan, dengan angka kemiskinan lebih merata di wilayah pedesaan daripada di perkotaan. Hal ini mengindikasikan adanya ketimpangan dalam distribusi kesejahteraan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Faktor-faktor seperti jumlah anak yang banyak dalam satu keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, serta akses terbatas terhadap layanan kesehatan menjadi beberapa penyebab utama kemiskinan di pedesaan. Kondisi ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta memperkuat urgensi untuk mengimplementasikan program-program pembangunan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antarwilayah. Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis (Meliala, 2012).

Berdasarkan beragam definisi yang ada, kajian mengenai kemiskinan terus dikaji ulang dan diperluas untuk mempertimbangkan permasalahan-permasalahan dan faktor-faktor yang menjadi penyebab utama kemiskinan. Salah satu definisi yang semakin mendapat perhatian, terutama dalam konteks program-program pengentasan kemiskinan di negara-negara berkembang, adalah definisi yang dikemukakan oleh Chambers. Definisi tersebut menekankan pentingnya memahami kemiskinan dalam konteks multidimensional, yang melibatkan tidak hanya aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial, budaya, dan lingkungan. Dengan memperluas cakupan definisi kemiskinan ini, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan dapat

lebih efektif dan tepat sasaran, serta mampu menciptakan dampak yang berkelanjutan bagi masyarakat yang terpinggirkan. Oleh karena itu, definisi kemiskinan yang holistik dan multidimensional seperti yang dikemukakan oleh Chambers telah menjadi fokus utama dalam pembangunan kebijakan dan program-program intervensi di berbagai belahan dunia. Chambers dalam Subandi (2014) menyatakan bahwa definisi kemiskinan adalah suatu kesatuan konsep (*integrated concept*) yang memiliki lima dimensi yaitu:

1) Kemiskinan (*Poverty*)

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok tidak hanya pada kelompok yang tidak memiliki pendapatan, akan tetapi dapat berlaku pada kelompok yang telah memiliki pendapatan namun tidak mampu mencukupi kebutuhannya.

2) Ketidakberdayaan (*Powerless*)

Rendahnya kemampuan pendapatan akan berdampak pada kekuatan sosial (*social power*) dari seseorang atau kelompok orang terutama dalam memperoleh keadilan ataupun persamaan hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

3) Kerentanan Menghadapi Situasi Darurat (*State of Emergency*)

Seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang tidak terduga, dimana situasi ini membutuhkan alokasi pendapatan yang cukup untuk menyelesaikannya.

4) Ketergantungan (*Dependence*)

Lemahnya kekuatan sosial dari seseorang atau kelompok orang yang disebut miskin menyebabkan tingkat ketergantungan terhadap pihak lain adalah sangat tinggi.

5) Keterasingan (*Isolation*)

Dimensi ketersaingan yang dimaksudkan oleh Chambers adalah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Umumnya kondisi ini berada pada daerah yang jauh dari pusat pertumbuhan ekonomi.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa masyarakat yang terjebak dalam kemiskinan adalah mereka yang terus-menerus menghadapi kondisi di mana mereka tidak memiliki daya untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Hal ini mencakup ketidakmampuan mereka dalam beberapa aspek, termasuk (1) kekurangan dalam kemampuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan, (2) kesulitan dalam mengakses sumber daya sosial dan ekonomi yang tersedia, dan (3) kesulitan untuk mengatasi kondisi mental dan norma budaya yang merugikan yang memelihara siklus kemiskinan, sehingga mengakibatkan penurunan martabat dan harga diri..

A. Bentuk dan Jenis Kemiskinan

Masalah kemiskinan dan faktor penyebabnya mengilhami pandangan yang lebih luas dalam ilmu pengetahuan bahwa kemiskinan tidak hanya terbatas pada ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, kemiskinan dipahami sebagai masalah yang bersifat multidimensional, yang melibatkan berbagai aspek kehidupan termasuk, namun tidak terbatas pada, aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Ini menunjukkan

bahwa penanganan kemiskinan memerlukan pendekatan multidimensional. Berdasarkan permasalahan tersebut kemiskinan memiliki 4 bentuk yakni sebagai berikut:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan Absolut adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada dibawah garis kemiskinan, sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau keseluruhan lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan tidak hanya merujuk pada kondisi material, tetapi juga melibatkan aspek-aspek non-material seperti sikap, gaya hidup, nilai-nilai, dan orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat. Hal ini mencakup pola pikir dan perilaku yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern, sehingga melampaui sekadar keterbatasan ekonomi semata. Dalam konteks ini, kemiskinan juga dapat diinterpretasikan sebagai ketidakmampuan untuk mengadopsi atau berpartisipasi dalam perubahan sosial, ekonomi, atau budaya yang diperlukan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumberdaya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosia politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan.

5. Kemiskinan Alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terbentuk sebagai akibat adanya kelangkaan sumber daya alam dan minimnya sarana umum (jalan raya, listrik, air bersih). Umumnya kondisi ini dialami oleh daerah yang belum terjangkau oleh pembangunan sehingga menjadi daerah tertinggal.

6. Kemiskinan Buatan

Adalah kemiskinan yang diakibatkan oeh sistem modernisasi atau kemiskinan yang membuat masyarakat sulit untuk menguasai sumber daya alam, sarana umum, dan fasilitas ekonomi secara merata.

Dari penjelasan bentuk kemiskinan seperti yang telah dijelaskan diatas dapat dipahami bahwa kemiskinan yang merupakan ketidakberdayaan dan ketidakmampuan mampu menumbuhkan prilaku dan mentalitas miskin yang bermuara pada hilangnya kemerdekaan dalam berusaha dan menikmati kesejahteraan secara bermartabat.

B. Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Sharp dalam (Kuncoro, 2006) terdapat tiga faktor penyebab kemiskinan jika dipandang dari sisi ekonomi.

1. Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
2. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktifitanya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau keturunan.
3. Kemiskinan muncul karena perbedaan akses dalam modal. Menurut Rencana Kerja Pemerintah Bidang Prioritas Penanggulangan Kemiskinan, penyebab kemiskinan adalah pemerataan pembangunan yang belum menyebar secara merata terutama di daerah pedesaan.

Kesempatan berusaha di daerah pedesaan dan perkotaan belum sepenuhnya dapat menghasilkan pendapatan yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi rumah tangga yang hidup dalam kemiskinan. Masih terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan hal ini, salah satunya adalah akses terbatas terhadap pelayanan dan fasilitas dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, air minum, sanitasi, dan transportasi. Kurangnya aksesibilitas ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin untuk mengambil manfaat dari peluang ekonomi yang ada.

Selain itu, program bantuan sosial yang ditujukan kepada masyarakat miskin juga belum mencapai tingkat yang memadai. Meskipun ada upaya dalam memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, namun cakupan dan jumlah bantuan tersebut masih jauh dari cukup. Begitu pula dengan pelayanan

bantuan yang ditujukan kepada kelompok rentan seperti penyandang cacat, lanjut usia, dan yatim-piatu. Meskipun ada program-program bantuan yang tersedia, namun masih terdapat kekurangan dalam mencakup semua kelompok yang membutuhkan.

Jaminan sosial bagi rumah tangga miskin juga masih belum memadai. Meskipun ada upaya untuk memberikan perlindungan sosial kepada mereka, namun cakupan dan kualitas jaminan sosial masih jauh dari optimal. Oleh karena itu, masih dibutuhkan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan dasar, memperluas cakupan dan kualitas program bantuan sosial, serta memperkuat jaminan sosial bagi rumah tangga miskin guna mengatasi tantangan kemiskinan yang terus menghantui masyarakat..

Menurut Hartomo dan Aziz dalam Laksono (2021) terdapat beberapa faktor penyebab timbulnya kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan yang Terlampau Rendah

Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2. Malas Bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3. Keterbatasan Sumber Daya Alam

Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin karena sumber daya alamnya miskin.

4. Terbatasnya Lapangan Kerja

Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara faktual hal tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5. Keterbatasan Modal

Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6. Beban Keluarga

Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

2.1.3. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah merujuk pada segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah yang terkait dengan pendanaan dan pelaksanaan program-program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengeluaran ini mencakup berbagai

aspek, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial dan perlindungan sosial.

Instrumen sentral dalam pengaturan dan pelaksanaan kebijakan pengeluaran adalah anggaran. Anggaran menjadi alat utama yang digunakan pemerintah untuk merencanakan, mengalokasikan, dan mengontrol penggunaan dana publik. Melalui anggaran, pemerintah dapat menetapkan prioritas, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Alasan kenaikan belanja harus dibedakan antara belanja barang dan jasa dan belanja kiriman uang, karena keduanya merupakan faktor yang cukup berbeda (Musgrave & Musgrave, 1991).

APBN, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan sebuah instrumen yang sangat penting dalam mengatur pengeluaran dan penerimaan pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari APBN adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, mendukung berbagai kegiatan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan nasional, serta mencapai stabilitas keuangan negara. Selain itu, APBN juga berperan dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan nasional.

APBN memiliki serangkaian tugas yang sangat vital, antara lain memberikan otorisasi atas penggunaan dana publik, merencanakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah, mengendalikan penggunaan anggaran, mengalokasikan sumber daya, mendistribusikan dana secara adil, serta menstabilkan perekonomian. Seluruh pendapatan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban pemerintah harus dimasukkan dan diatur dalam APBN. Salah satu keistimewaan dari APBN adalah kemampuannya untuk mengakomodasi kelebihan penerimaan pemerintah. Jika terjadi kelebihan penerimaan, dana tersebut dapat digunakan untuk

membayai pengeluaran pemerintah pada tahun anggaran berikutnya, sehingga memastikan penggunaan dana yang efisien dan efektif. Meskipun kontribusinya mungkin lebih kecil dibandingkan dengan total penerimaan anggaran, namun jumlahnya terus meningkat secara signifikan setiap tahunnya.

Dana yang diterima melalui APBN selanjutnya dialokasikan untuk berbagai program dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh karena itu, APBN menjadi instrumen utama dalam upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Adapun Teori Pengeluaran Negara sebagai berikut :

1. Musgrave dan Rostow

Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari suatu negara. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur seperti sarana jalan, kesehatan, pendidikan, dll. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sektor swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya peningkatan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dsb.

2. Wagner

Berdasarkan pengamatan dari negara-negara maju, disimpulkan bahwa dalam perekonomian suatu negara, pengeluaran pemerintah akan meningkat sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita negara tersebut. Di

negaranegara maju, kegagalan pasar bisa saja terjadi, menimpa industri-industri tertentu dari negara tersebut. Kegagalan dari suatu industri dapat saja merembet ke industri lain yang saling terkait. Di sini diperlukan peran pemerintah untuk mengatur hubungan antara masyarakat, industri, hukum, pendidikan, dan lain-lain. Teori ini mengemukakan perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam prosentase terhadap GNP, dimana teori ini di dasarkan pada pengamatan di negara-negara Eropa, US, dan Jepang pada abad ke-19 (Mangkoesoebroto, 1999). Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum Wagner, sebagai berikut Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat.

Hukum Wagner ini ditunjukkan dalam gambar berikut dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial yang ditunjukkan olehkurva perkembangan pengeluaran pemerintah (Mangkoesoebroto, 1999).

3. Peacock dan Wiseman

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan pengeluaran negara tidak disukai oleh masyarakat, karena hal itu berarti masyarakat harus membayar pajak lebih besar. Masyarakat mempunyai sikap toleran untuk membayar pajak sampai pada suatu tingkat tertentu. Apabila pemerintah menetapkan jumlah pajak di atas batas toleransi masyarakat, ada kecenderungan masyarakat untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Sikap ini mengakibatkan pemerintah tidak bisa semena-mena menaikkan pajak yang harus dibayar masyarakat.

Dalam kondisi normal, dengan berkembangnya perekonomian suatu negara akan semakin berkembang pula penerimaan negara tersebut, walaupun pemerintah tidak menaikkan tarif pajak. Peningkatan penerimaan negara akan memicu peningkatan pengeluaran dari negara tersebut. Dalam kondisi tidak normal, misalnya dalam keadaan perang, pemerintah memerlukan pengeluaran negara yang lebih besar. Keadaan ini membuat pemerintah cenderung meningkatkan pungutan pajak kepada masyarakat. Peningkatan pungutan pajak dapat mengakibatkan investasi swasta berkurang, dan perkembangan perekonomian menjadi terkendala. Perang tidak bisa dibiayai dari pajak saja. Pemerintah terpaksa cari pinjaman untuk biaya perang. Setelah perang selesai pemerintah harus membayar angsuran pinjaman dan bunga. Oleh karenanya pajak tidak akan turun ke tingkat semula walaupun perang sudah selesai.

Setelah perang selesai, pengeluaran negara akan turun dari tingkat pengeluaran negara saat perang, namun masih lebih tinggi dari tingkat pengeluaran negara sebelum perang. Sementara itu pengeluaran swasta akan meningkat, namun masih masih dibawah tingkat pengeluaran swasta sebelumperang.

Peacock dan Wiseman dalam Mangkoesobroto (1999) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pungutan pajak.

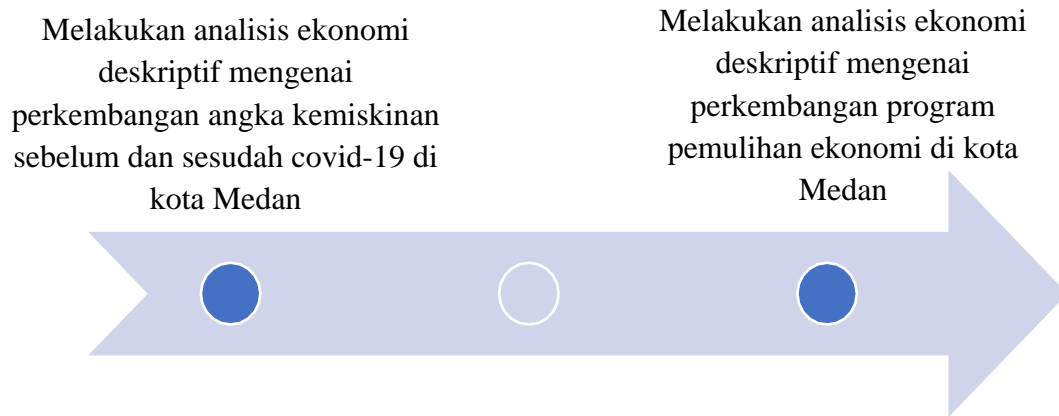
2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil
1	(Sani et al., 2022)	Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia	Regresi panel dengan dummy variable	Penelitian mengungkapkan bahwa pandemi covid-19 memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kemiskinan perkotaan dan tingkat pengangguran, tetapi tidak signifikan terhadap kemiskinan perkotaan. Menggunakan data time series selama periode tersebut, pandemi ini ternyata memperbaiki distribusi pendapatan di masyarakat, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan
2	(Setyadi & Indriyani, 2021)	Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Peningkatan Resiko Kemiskinan Di Indonesia	Regresi Linier Berganda	Hasilnya menunjukkan bahwa variabel jumlah kasus positif COVID-19 memiliki pengaruh positif dan signifikan berpengaruh pada kemiskinan. Angka harapan hidup dan ketimpangan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kemiskinan dan PDB per kapita berpengaruh negatif namun signifikan terhadap kemiskinan. Berdasarkan pada hasil regresi, setiap peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 sebesar 1 orang akan menambah jumlah kemiskinan sebesar

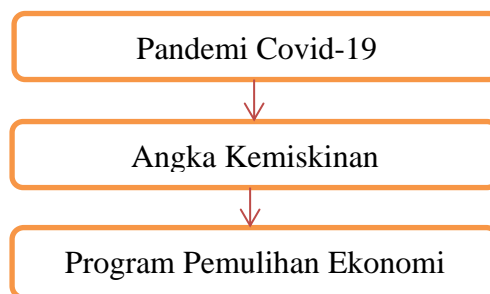
				0,0087 orang. Setiap tahun meningkat di angka harapan hidup akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar 130.11932 orang. Setiap peningkatan ketimpangan pendapatan sebesar 1% akan meningkatkan jumlah kemiskinan sebesar 533.7175 rakyat. Setiap kenaikan PDRB per kapita sebesar Rp. 1000 maka akan mengurangi jumlah kemiskinan sebesar 0,0234 orang.
3	Hapusan Hutahean (2020)	Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usaha Kecil menengah Masa Pandemi Covid19 Di Kabupaten Deliserdang	Regresi Linier Berganda	Dapat dilihat bahwa nilai Modal(X1) adalah 0,469. Hal ini menyatakan bahwa setiap bertambahnya Modalsebesar 1 persen mengakibatkan Pendapatan Usaha Mikrodi Kabupaten Deliserdang akan mengalami peningkatan sebesar 0,46. Modal dan tenaga kerja secara bersamasama(simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Usaha Mikro di Kabupaten Deliserdang

2.3. Tahapan Penelitian



Gambar 2 1 Kerangka Alur Tahapan Penelitian

2.4. Kerangka Konseptual



Gambar 2 2 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambar atau deskriptif tentang suatu keadaan secara objektif yang menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya (Arikunto, 2013).

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kawasan Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Alasan dipilihnya kota medan karena kota medan merupakan salah satu wiayah dengan jumlah penduduk terbanyak dan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia.

3.2.2. Waktu Penelitian

Waktu dalam penelitian ini direncanakan selama 3 bulan, mulai dari bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Maret 2023.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer dan sekunder. Data primer yang digunakan adalah data yang langsung dihasilkan melalui reponden dengan menggunakan kuesioner. Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data (Kuncoro, 2013). Data sekunder diperoleh dari kantor badan pusat statistik Kota Medan data dari Kemenkeu.

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah kelompok elemen yang lengkap, yang biasanya berupa orang, objek, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini populasinya adalah rumah tangga penerima bantuan Sosial di Kota Medan.

3.4.2 Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas (Kuncoro, 2013).

Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar, hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data (Kuncoro,2013). Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 sampel.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer menggunakan kuesioner yang berisikan pertanyaan dengan 5 pilihan jawaban yaitu sangat tidak setuju, tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju, dan pengumpulan data sekunder menggunakan dokumentasi dari data Badan Pusat Statistik dan Kemenkeu yang meliputi jumlah tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah covid, gambaran umum, serta informasi lain yang menunjang penelitian yang diperoleh dari buku referensi, jurnal, internet, dan studi pustaka dari penelitian-penelitian terdahulu yang terkait serta sumber lain yang dapat menunjang penelitian yang ingin dicapai.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Metode analisis kuantitatif adalah pendekatan pengolahan data melalui metode statistik atau matematik yang terkumpul dari data sekunder dimana data dianalisis secara deskriptif kemudian disajikan dengan bantuan diagram atau kurva.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Geografi

Kota Medan merupakan dataran rendah yang merupakan tempat pertemuannya dua sungai penting, yaitu Sungai Babura dan Sungai Deli. Wilayahnya berada pada ketinggian 2,5 – 37,5 m di atas permukaan laut. Secara astronomis, Medan terletak antara 03o27' – 3o47' Lintang Utara dan 98o35' – 98o44' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Medan berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah Utara, Selatan, Barat dan Timur.

Tabel 4.1 Luas Kecamatan Kota Medan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	%
1	Medan Tuntungan	20.68	7.80
2	Medan Johor	14.58	5.50
3	Medan Amplas	11.19	4.22
4	Medan Denai	9.05	3.41
5	Medan Area	5.52	2.08
6	Medan Kota	5.27	1.99
7	Medan Maimun	2.98	1.13
8	Medan Polonia	9.01	3.40
9	Medan Baru	5.84	2.20
10	Medan Selayang	12.81	4.83
11	Medan Sunggal	15.44	5.83
12	Medan Helvetia	13.16	4.97
13	Medan Petisah	6.82	2.57
14	Medan Barat	5.33	2.01
15	Medan Timur	7.76	2.93
16	Medan Perjuangan	4.09	1.54
17	Medan Tembung	7.99	3.01
18	Medan Deli	20.84	7.86
19	Medan Labuhan	36.67	13.83
20	Medan Marelan	23.82	8.99
21	Medan Belawan	26.25	9.90
	Kota Medan	265.10	100.00

Sumber : Kota Medan Dalam Angka, 2022

Medan memiliki wilayah seluas 265,10 km². Kota Medan termasuk beriklim tropis dengan suhu maksimum pada tahun 2017 mencapai 34,3°C. Jumlah hari hujan di Kota Medan pada tahun 2017 adalah sebanyak 14 hari dengan rata-rata curah hujan per bulannya 179 mm, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 141 mm per bulan. Kelembaban udara di wilayah Kota Medan rata-rata 78 - 85%. Sementara itu, rata-rata kecepatan angin di Kota Medan pada tahun 2017 adalah sebesar 2,4m/sec, dengan penguapan udara sebesar 108,2 mm. Kota Medan memiliki 21 Kecamatan dimana Kecamatan Medan Labuhan merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah mencapai 36.67 km². Kecamatan Medan Maimun menjadi kecamatan yang terkecil di Kota Medan dengan luas wilayah hanya 2,98 km².

4.1.2 Kondisi Demografi

Kota Medan merupakan salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, dimana jumlah penduduk kota Medan cukup banyak. Berdasarkan data tahun 2020 penduduk kota Medan berjumlah 2.435.252 dengan total penduduk laki – laki sebanyak 1.212.069 dan perempuan sebanyak 1.223.183. Adapun Jumlah penduduk Kota Medan berdasarkan kecamatan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Medan Tahun 2020

Wilayah	Jumlah Penduduk Kota Medan Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin (Jiwa)								
	Laki-Laki			Perempuan			Laki-Laki+Perempuan		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Medan Tuntungan	43 369	43 655	48 243	44 570	44 969	49 006	87 939	88 624	97 249
Medan Johor	67 053	67 543	75 660	69 016	69 824	76 096	136 069	137 367	151 756
Medan Amplas	63 858	64 589	64 577	65 465	66 337	65 149	129 323	130 926	129 726
Medan Denai	73 109	73 296	85 282	74 872	75 142	84 361	147 981	148 438	169 643
Medan Area	49 391	49 488	58 023	50 602	50 774	59 006	99 993	100 262	117 029
Medan Kota	37 122	37 148	41 189	38 031	38 083	43 477	75 153	75 231	84 666
Medan Maimun	20 296	20 314	24 134	20 796	20 825	25 097	41 092	41 139	49 231
Medan Polonia	28 379	28 456	29 857	29 122	29 226	30 058	57 501	57 682	59 915
Medan Baru	20 228	20 306	17 467	20 735	20 843	19 055	40 963	41 149	36 522
Medan Selayang	54 192	54 676	50 948	55 734	56 376	52 228	109 926	111 052	103 176
Medan Sunggal	57 881	58 032	63 909	59 308	59 503	65 154	117 189	117 535	129 063
Medan Helvetia	75 983	76 576	81 529	78 006	78 861	83 381	153 989	155 437	164 910
Medan Petisah	31 604	31 627	34 614	32 388	32 448	37 230	63 992	64 075	71 844
Medan Barat	36 265	36 301	43 697	37 159	37 235	44 905	73 424	73 536	88 602
Medan Timur	55 551	55 776	57 284	56 931	57 269	59 701	112 482	113 045	116 985
Medan Perjuangan	47 832	47 880	51 025	49 016	49 111	52 788	96 848	96 991	103 813
Medan Tembung	68 556	68 683	72 727	70 328	70 566	73 807	138 884	139 249	146 534
Medan Deli	93 464	94 403	95 957	95 343	96 568	93 364	188 807	190 971	189 321
Medan Labuhan	59 834	60 478	67 633	61 027	61 714	66 132	120 861	122 192	133 765
Medan Marelan	85 368	86 812	92 550	87 088	88 570	89 965	172 456	175 382	182 515
Medan Belawan	49 067	49 228	55 764	50 206	50 383	53 223	99 273	99 611	108 987
Medan	1 118 402	1 125 267	1 212 069	1 145 743	1 154 627	1 223 183	2 264 145	2 279 894	2 435 252

Sumber : BPS, 2020

Berdasarkan data di atas, dapat diamati bahwa kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah kecamatan Medan Deli, dengan total penduduk mencapai 189.321 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 95.957 jiwa laki-laki dan 93.364 jiwa perempuan. Di posisi kedua, terletak kecamatan Medan Marelan, yang memiliki total penduduk sebanyak 182.515 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 92.550 jiwa laki-laki dan 89.965 jiwa perempuan. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kecamatan Medan Baru, yang memiliki total penduduk sebanyak 36.522 jiwa. Dari jumlah tersebut, terdapat 17.467 jiwa laki-laki dan 19.055 jiwa perempuan. Analisis dari data ini menunjukkan pola distribusi penduduk di berbagai kecamatan di Kota Medan, dengan kecamatan Medan Deli dan Medan Marelan menjadi pusat populasi yang signifikan, sementara kecamatan Medan Baru memiliki jumlah penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya..

4.2 Tingkat Kemiskinan Sebelum Dan Sesudah Terjadinya Covid-19 Di Kota Medan

Kemiskinan telah menjadi isu global yang dapat menghambat kesejahteraan dan kemajuan peradaban umat manusia, bahkan Badan Pusat Statistik (BPS) Ekonomi Pembangunan mencatat hingga bulan September 2020 persentase penduduk miskin di Indonesia menembus angka 10,19 persen, meningkat 0,41 persen terhadap Maret 2020 dan meningkat 0,97 persen terhadap September 2019. Menurut pakar kemiskinan, faktor ekonomi sering kali disebut sebagai penyebab utama munculnya kemiskinan. Namun pada kenyataannya, faktor politik adalah faktor yang paling dominan memainkan peranan bagi munculnya penduduk miskin baru akibat berbagai kebijakan yang dibuat.

Selain itu, faktor pendidikan yang rendah, dan faktor infrastruktur yang terbatas menjadi penyebab makin banyaknya kemiskinan di Indonesia. Meskipun memiliki kelimpahan sumber daya alam, individu yang tinggal di daerah yang terpinggirkan dengan infrastruktur yang minim kemungkinan besar akan tetap terperangkap dalam lingkaran kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa meskipun potensi sumber daya alam dapat menjadi modal, namun kondisi infrastruktur yang terbatas dapat menjadi penghambat utama bagi upaya individu untuk keluar dari kemiskinan (Dewi, 2023)

Data BPS memberikan gambaran tentang tingkat kemiskinan di Kota Medan dengan menggunakan konsep kapasitas untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kemiskinan diukur berdasarkan kemampuan suatu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan utama, seperti pangan, bukan hanya berdasarkan pengeluaran. Dalam perspektif ini, populasi yang berada di bawah garis kemiskinan adalah mereka yang memiliki biaya hidup per bulan di bawah ambang batas kemiskinan yang telah ditetapkan. Ini menunjukkan bahwa definisi kemiskinan tidak hanya berdasarkan pada pengeluaran, tetapi juga pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan Tahun 2017 - 2023

Kabupaten / Kota	Jumlah Penduduk Miskin Kota Medan (000) (Jiwa)						
	Pasca Covid				Sebelum Covid		
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Sumatera Utara	1 239,71	1 268,19	1 343,86	1 283,29	1 282,04	1 324,98	1 453,87
Medan	187,28	187,74	193,03	183,54	183,79	186,45	204,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Utara, 2023

Dari data diatas dapat terlihat bahwa jumlah angka penduduk miskin kota Medan pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan. Apabila dilihat dari tahun 2017 jumlah penduduk miskin di Kota Medan mengalami penurunan. Pada tahun

2017 penduduk miskin Kota Medan 204.22 ribu mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 183.54 ribu. Akibat dari dampak pandemic dan pembatasan ekonomi di kota Medan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 193.03 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa pandemic covid-19 memberi dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dan kemiskinan kota Medan. Namun di tahun 2022-2023 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 187,28 juta jiwa.

Berdasarkan permasalahan tersebut, sudah terlihat jelas bahwa peningkatan kemiskinan terus menaik saat terjadi pandemi covid-19. Selain pedagang, para buruh juga dilakukan pemutusan kerja karena berkurangnya pemasukkan pabrik dan toko akibat tidak terjadi jual-beli produk. Kuli bangunan juga terpaksa menunggu kestabilan uang pemborong bangunan yang sudah pasti dipakai untuk memenuhi kecukupan keluarga selama di rumahkan, begitu yang terjadi pada profesi lainnya. Pembatasan yang diberlakukan membuat warga kehilangan pekerjaannya masing-masing (Noni Rozaini et al., 2022).

Selama pandemi COVID-19, tingkat kemiskinan di Kota Medan meningkat seiring dengan menurunnya pendapatan masyarakat dan meningkatnya tingkat pengangguran. Pembatasan aktivitas ekonomi yang signifikan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran di kota ini. Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan berbagai program bantuan sosial sebagai langkah untuk memerangi kemiskinan. Namun, untuk memastikan bahwa bantuan tersebut sampai kepada mereka yang membutuhkan, Pemerintah Kota Medan perlu berkolaborasi erat dengan pemerintah pusat. Dalam konteks ini, kepemimpinan yang kuat dan efektif di Kota

Medan sangatlah penting. Pemimpin yang peduli dan berkomitmen terhadap kesejahteraan masyarakatnya menjadi kunci dalam memastikan bahwa berbagai program bantuan sosial dapat dijalankan dengan efisien dan berhasil mencapai sasaran yang dituju, sehingga dapat memberikan dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di kota Medan. Mengembangkan usaha kecil dan menengah adalah salah satu cara untuk memerangi kemiskinan (Hanifah Ramadhani et al., 2022).

4.3 Perkembangan program pemulihan ekonomi di kota Medan pasca pandemic covid-19

Krisis akibat Covid-19 saat ini terjadi secara simultan, sehingga akibatnya sangat dirasakan oleh kelompok rentan yang semakin terpuruk, diantaranya kelompok usaha yang membutuhkan keramaian massa, kelompok pekerja harian lepas, para buruh yang terdampak PHK, petani, masyarakat miskin, dan seterusnya (Kurniawansyah et al., 2020). Guna mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap perekonomian, pemerintah melalui Kemensos telah menerapkan berbagai program bantuan sosial seperti: peningkatan jumlah penerima bantuan pada Program Keluarga Harapan, program bantuan non-tunai atau Program Sembako Bantuan Sosial diharapkan dapat membantu masyarakat yang terkena dampak covid terutama penduduk miskin yang terdampak karena pandemi yang tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan meningkatkan taraf ekonomi rumah tangga agar dapat Ekonomi Pembangunan bertahan hidup selama pandemi.

Program–Program yang merupakan skema pemerintah dalam membantu masyarakat yang ekonominya terdampak Covid-19. Ada tujuh (7) program pemerintah selama Pandemi yang antara lain (Hasibuan et al., 2022) :

1. Bantuan sembako. Bantuan sosial berupa paket sembako dikururkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret 2020.
2. Bantuan sosial tunai bersamaan dengan bantuan sembako, program ini juga diberikan sejak awal kasus Covid-19 muncul di Indonesia. Program ini memberikan dana secara tunai sebesar Rp 600.000 ke masyarakat dalam jangka waktu 3 bulan, yakni April, Mei, dan Juni.
3. BLT dana desa Pemerintah juga mengalihkan sebagian Anggaran Dana Desa untuk BLT ini demi menghadapi dampak ekonomi pandemi Covid-19
4. Listrik gratis dan subsidi. Pemerintah juga memberikan insentif tarif listrik konsumen yang terdampak pandemi Covid-19.
5. Kartu Prakerja. Kartu Prakerja dirilis pemerintah untuk membantu karyawan yang terkena PHK dan pengangguran.
6. Subsidi gaji karyawan, pemerintah memutuskan mengururkan bantuan subsidi gaji bagi karyawan swasta Karyawan yang mendapat subsidi ini adalah mereka yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta.
7. BLT usaha mikro kecil Terakhir, pemerintah memberikan bantuan kepada para pelaku usaha mikro kecil berupa dana hibah atau bantuan langsung tunai (BLT). Dengan sistemnya, yakni pemberian bantuan modal usaha Rp 2,4 juta yang ditransfer lewat rekening.

Tabel 4.4 Belanja Bantuan Sosial Kota Meda Tahun 2018-2022 (Miliar)

Tahun	Anggaran	Realisasi	%
2018	5,00	0,13	2.64
2019	10,00	6,29	62,92
2020	15,10	1,71	11,33
2021	68,80	51,66	75,09
2022	74,26	56,90	76,62

Sumber: djpb Kemenkeu, 2024

Data dalam Tabel 4.3 menunjukkan belanja untuk bantuan sosial di Kota Medan dari tahun 2018 hingga 2022 dalam miliar Rupiah, termasuk anggaran, realisasi, dan persentase realisasi terhadap anggaran. Dari analisis data tersebut, terlihat bahwa belanja untuk bantuan sosial mengalami fluktuasi signifikan selama periode lima tahun tersebut. Pada tahun 2018, anggaran yang dialokasikan hanya sebesar 5 miliar Rupiah, namun realisasi hanya mencapai 0,13 miliar Rupiah, atau sekitar 2,64% dari anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan signifikan dalam anggaran dan realisasi, dengan anggaran mencapai 10 miliar Rupiah dan realisasi sebesar 6,29 miliar Rupiah, yang merupakan 62,92% dari anggaran yang dialokasikan.

Namun, pada tahun 2020, terlihat penurunan tajam dalam realisasi bantuan sosial, meskipun anggarannya meningkat menjadi 15,1 miliar Rupiah, hanya sebesar 1,71 miliar Rupiah yang terealisasi, atau sekitar 11,33% dari anggaran yang dialokasikan. Pada tahun-tahun berikutnya, terjadi peningkatan yang signifikan dalam realisasi bantuan sosial, khususnya pada tahun 2021 dan 2022, di mana realisasi mencapai 51,66 miliar Rupiah dan 56,9 miliar Rupiah, atau masing-masing sebesar 75,09% dan 76,62% dari anggaran yang dialokasikan. Dari analisis ini, terlihat bahwa pemerintah Kota Medan telah meningkatkan belanja untuk bantuan sosial dari tahun ke tahun, meskipun terdapat fluktuasi dalam tingkat realisasi, yang

mencerminkan komitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat..

Berikut data hasil penyebaran kuesioner yang ditujukan kepada penerima bantuan Sosial yang menjadi anggota sampel. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana penilaian responden terhadap pelaksanaan program Bantuan Sosial di Kota Medan. Adapun lebih detailnya, peneliti menjelaskannya dalam bentuk diagram disertai pemaparan dan kesimpulan dari hasil jawaban responden berdasarkan butir-butir pertanyaan yang telah peneliti buat sebelumnya. Dimana, butir-butir pertanyaan tersebut dituangkan dalam bentuk kuesioner. Uraian kuesioner diuraikan oleh peneliti dalam bentuk penjelasan butir-butir pertanyaan secara sistematis.

Pemaparan mengenai butir-butir pertanyaan ditafsirkan sesuai dengan indikator pertanyaannya, sehingga akan terlihat beberapa penafsiran dalam menguraikan jawaban responden yang berbeda tergantung dari indikator pertanyaannya. Seperti misalnya, SS (sangat setuju), S (setuju), N (Netral), TS (tidak setuju), STS (sangat tidak setuju). Uraian lebih lanjut mengenai hasilkuesioner dari penelitian ini, bisa dilihat pada uraian berikut ini.



Gambar 4.1 Bantuan Sosial Sudah merata

Berdasarkan hasil survei yang melibatkan 50 responden, terdapat variasi dalam persepsi terhadap efektivitas pemerataan bantuan sosial yang diberikan. Dari jumlah tersebut, hanya satu responden yang menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan bahwa bantuan sosial yang diberikan sudah merata. Sebanyak 10 responden menyatakan tidak setuju, sementara 21 responden memilih jawaban netral. Sebanyak 8 responden menyatakan setuju, dan 10 responden lainnya menyatakan sangat setuju. Dari hasil ini, terlihat bahwa mayoritas responden merasakan manfaat dari program bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19. Namun, sebagian kecil masyarakat masih merasa tidak puas dengan pemerataan bantuan yang diberikan.

Responden yang tidak setuju memiliki kekhawatiran tentang kriteria seleksi atau distribusi bantuan yang tidak adil atau tidak transparan. Mereka merasa bahwa ada ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam proses pemilihan penerima bantuan sosial, yang menyebabkan ketidakmerataan dalam penyaluran bantuan. Selain itu, beberapa responden memiliki persepsi bahwa pemerataan bantuan sosial tidak mencapai semua kelompok yang membutuhkan, seperti kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakmerataan dalam manfaat yang diperoleh oleh berbagai kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Ketidakpuasan masyarakat sejalan dengan (Af & Nulhaqim, 2021) yang menyatakan ketidakadilan dalam distribusi bantuan sosial dapat mengakibatkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap program tersebut. Disamping itu, (Shakina et al., 2023) menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses penyaluran bantuan sosial untuk memastikan efektivitas program. Menurut penelitian ini, ketidakjelasan atau ketidakadilan dalam proses pemilihan penerima

bantuan sosial dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program bantuan sosial yang diselenggarakan.

Oleh karena itu, hasil survei ini menunjukkan pentingnya untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan program bantuan sosial agar dapat mencapai semua lapisan masyarakat yang membutuhkan dengan lebih merata dan adil, serta memastikan bahwa proses seleksi dan distribusi bantuan dilakukan dengan transparan dan akuntabel.



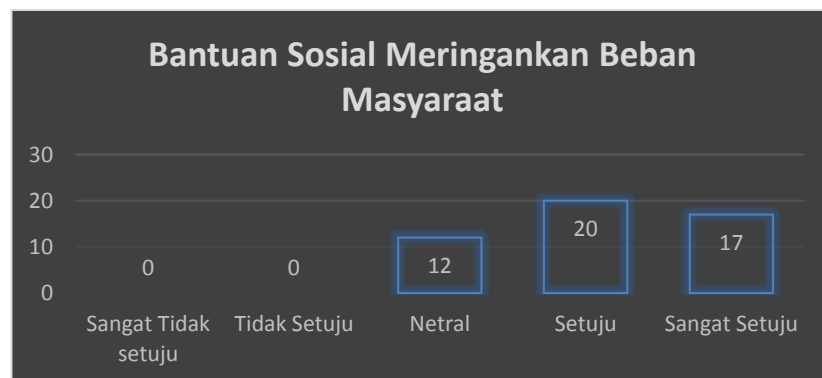
Gambar 4.2 Kepuasan dengan yang diterima

Berdasarkan hasil survei dengan 50 responden, terdapat variasi dalam pandangan terhadap efektivitas program bantuan sosial yang diberikan. Dari responden tersebut, 5 orang menjawab sangat tidak setuju, sementara 18 orang menjawab tidak setuju. Sebanyak 12 orang menjawab netral, 7 orang setuju, dan 8 orang sangat setuju. Besarnya jumlah responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju mencerminkan tingkat ketidakpuasan masyarakat terhadap nominal bantuan yang diterima.

Alasan utama dari responden yang menjawab tidak setuju atau sangat tidak setuju adalah ketidakmampuan dana bantuan yang diterima untuk mencukupi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Mereka merasa bahwa jumlah bantuan yang diberikan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan seperti makanan, pakaian,

dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Terutama bagi mereka yang memiliki jumlah anggota keluarga yang cukup banyak, nominal bantuan yang diterima dianggap jauh dari cukup

Deaton (2016) dalam penelitiannya menyoroti bahwa tingkat pengeluaran yang rendah, terutama untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, dapat menjadi indikator signifikan dari kemiskinan dan kesulitan ekonomi. Oleh karena itu, jika dana bantuan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tersebut, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan ketidakmampuan keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang signifikan terhadap program bantuan sosial, karena masyarakat merasa bahwa bantuan yang diterima tidak sebanding dengan kesulitan ekonomi yang mereka hadapi, terutama di tengah pandemi Covid-19 yang memperburuk kondisi finansial banyak keluarga.

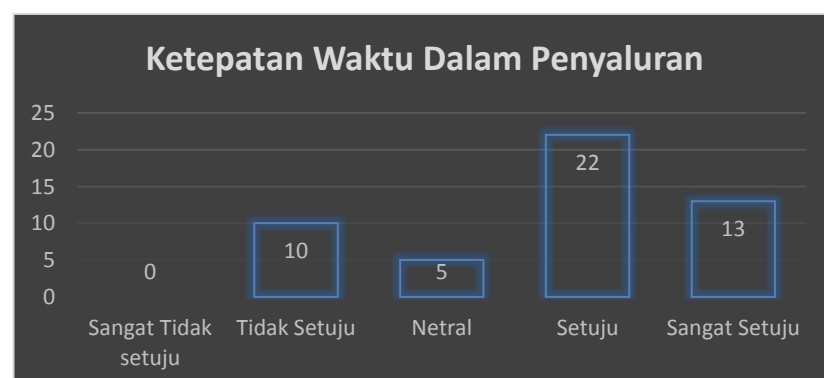


Gambar 4.3 Bantuan Sosial Meringankan Beban Masyarakat

Berdasarkan hasil survei dengan melibatkan 50 responden, ditemukan bahwa sebanyak 13 responden menjawab netral, 20 responden menjawab setuju, dan 17 responden menjawab sangat setuju terhadap efektivitas program Bantuan Sosial. Dari data tersebut, tampak bahwa mayoritas penerima Bantuan Sosial menyatakan bahwa program tersebut memberikan manfaat yang signifikan dalam

meringankan beban hidup keluarga miskin. Mereka merasa bahwa adanya program Bantuan Sosial memiliki pengaruh yang sangat besar dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga sehari-hari. Analisis ini menunjukkan bahwa program Bantuan Sosial dianggap sebagai sarana yang efektif dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas finansial keluarga miskin.

Banerjee et al., (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa program bantuan sosial yang dirancang dengan baik dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Hasilnya menunjukkan bahwa program bantuan sosial efektif dalam meringankan beban hidup keluarga miskin dan meningkatkan stabilitas finansial mereka. Studi ini juga menggambarkan bahwa program bantuan sosial dianggap sebagai alat yang efektif dalam memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas finansial keluarga miskin.



Gambar 4.4 Ketepatan Waktu Dalam Penyaluran

Berdasarkan hasil survey dengan 50 responden. 10 responden menjawab tidak setuju, 5 responden menjawab netral dan 22 menjawab setuju, dan 13

menjawab sangat setuju. Proses penyaluran dana pun terkadang diterima pada awal bulan, sehingga mereka merasa puas dengan hal tersebut. Mayoritas penerima bantuan sosial menyatakan kepuasan terhadap proses penyaluran dana yang dilakukan dengan tepat waktu. Mereka percaya bahwa proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menemui kendala yang berarti. Namun, sebagian responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut mengalami masalah terkait keterlambatan dalam menerima dana bantuan sosial. Mereka menganggap bahwa proses penyaluran tidak memenuhi harapan atau standar yang diinginkan, sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dan ketidakpuasan dalam mengatur keuangan keluarga.

Keterlambatan dalam penyaluran dana dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti masalah administrasi, teknis, atau logistik. Misalnya, adanya kesalahan dalam penginputan data, permasalahan teknis pada sistem pengelolaan dana, atau kesulitan logistik dalam distribusi dana ke lokasi penerima bantuan. Ketidakmampuan dalam menangani faktor-faktor ini secara efektif dapat menyebabkan penundaan yang tidak diinginkan dalam penyaluran bantuan sosial.

Penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya penyaluran dana bantuan sosial yang tepat waktu dalam mencapai tujuan program dan meningkatkan kepuasan penerima bantuan. Menurut (Kaunang et al., 2023) penyaluran dana yang dilaksanakan dengan efisiensi dan tepat waktu memiliki dampak positif yang signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program bantuan sosial. Proses penyaluran yang lancar dan teratur tidak hanya memberikan keyakinan kepada penerima bantuan, tetapi juga memperkuat legitimasi program tersebut di mata masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penelitian tersebut juga

menunjukkan bahwa penyaluran dana yang tepat waktu dapat berperan dalam meminimalkan dampak negatif yang terkait dengan ketidakpastian finansial. Dengan penyaluran yang efisien, penerima bantuan sosial dapat merasa lebih aman secara finansial dan lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang mungkin timbul di masa depan. Oleh karena itu, perhatian terhadap proses penyaluran dana yang lancar dan tepat waktu menjadi krusial dalam menjaga efektivitas dan kredibilitas program bantuan sosial.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyimpulkan beberapa kesimpulan yaitu, sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 penduduk miskin Kota Medan 204.22 ribu mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 183.54 ribu. Akibat dari dampak pandemic dan pembatasan ekonomi di kota Medan pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin kembali meningkat menjadi 193.03 ribu. Hal ini menunjukkan bahwa pandemic covid-19 memberi dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian dan kemiskinan kota Medan. Namun di tahun 2022-2023 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan menjadi 187,28 juta jiwa.
2. Implementasi Bantuan Sosial di Kota Medan Pada Masa Pandemi Covid-19 telah berjalan cukup baik dan Namun masih banyak masyarakat yang tidak puas dengan penyebaran bantuan sosial tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Tim pelaksana teknis Bantuan Sosial tingkat kelurahan harus menetapkan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang berhak mendapatkan program Bantuan Sosial berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh BPS yang telah tersusun di petunjuk pelaksana teknis Bantuan Sosial

2. Pemerintah dalam membuat suatu kebijakan yang bertujuan menurunkan angka kemiskinan sebaiknya didalam pelaksanaan program tersebut harus bisa lebih bertujuan memberdayakan masyarakat miskin, memberikan pelatihan keterampilan kerja dan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat miskin agar program Bantuan Sosial ini bisa berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Af, K. F., & Nulhaqim, S. A. (2021). Analisis Konflik Distribusi Bantuan Sosial Covid-19 Dan Strategi Penyelesaian Konflik Di Kota Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 3(1), 65–74.
- Akib, I., & Risfaisal, R. (2015). Bantuan langsung tunai. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 3(2).
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*.
- Arsyad, L. (2015). *Ekonomi Pembangunan: Edisi kelima*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Banerjee, A., Duflo, E., Goldberg, N., Karlan, D., Osei, R., Parienté, W., Shapiro, J., Thuysbaert, B., & Udry, C. (2015). A multifaceted program causes lasting progress for the very poor: Evidence from six countries. *Science*, 348(6236), 1260799.
- Bhinadi, A. (2017). *Penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat*. Deepublish.
- Deaton, A. (2016). Measuring and understanding behavior, welfare, and poverty. *American Economic Review*, 106(6), 1221–1243.
- Dewi, I. R. (2023). Mengupas Kemiskinan di Provinsi Banten: Bagaimanakah Peran Faktor Kependudukan dan Ekonomi? *Ecoplan*, 6(2), 100–117.
- Hanifah Ramadhani, Nur Afria Nanda Safitri, Wanhar Nasution, & Juliana Nasution. (2022). Tingkat Kemiskinan Di Wilayah Kota Medan Serta Solusi Pemerintah Dalam Menanganinya. *Transformasi: Journal of Economics and Business Management*, 1(4), 34–45. <https://doi.org/10.56444/transformasi.v1i4.230>
- Hasibuan, B. P., Siloam, A., & ... (2022). Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Menyalurkan Bantuan Sosial Covid-19 Kepada Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2020. *Jurnal ...*, 7, 90–103.
- Hutahaean, H. (2020). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha kecil menengah (ukm) masa pandemi covid 19 di kabupaten deliserdang. *Journal Economics and Strategy*, 1(1), 1–10.
- Kaunang, D. R. A., Taroreh, S. R. A., & Mongkau, F. E. (2023). Efektivitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (Pkh) Bagi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelurahan Pangolombaian. *Journal Social Welfare*, 11(1), 29–35.
- Kuncoro, M. (2006). *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, Dan kebijakan)*, edisi Ke empat. UPP STIM YKPN: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode riset untuk bisnis dan ekonomi edisi 4*. Jakarta: Erlangga.
- Kurniawansyah, H., Amrullah, A., Salahuddin, M., Muslim, M., & Nurhidayati, S.

- (2020). Konsep kebijakan strategis dalam menangani eksternalitas ekonomi dari COVID-19 pada masyarakat rentan di Indonesia. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(2), 130–139.
- Laksono, W. A. (2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten Bogor Tahun 2010-2020*. Universitas Siliwangi.
- Mangkoesoebroto, G. (1999). *Ekonomi Publik Edisi 3. BPFE, Yogyakarta*.
- Meliala, A. (2012). Masalah Kemiskinan dan Kejahatan serta Respon Kebijakan Publik dalam Rangka Mengatasinya. *Jurnal Dialog Kebijakan Publik*, 8.
- Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1991). *Keuangan negara dalam teori dan praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Nasrah, N., & Muafiah, A. M. A. (2020). Analisis motivasi belajar dan hasil belajar daring mahasiswa pada masa pandemik Covid-19. *JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar)*, 3(2), 207–213.
- Noni Rozaini, Lubis, A., Lubis, A. S. W., Marpaung, C., Mutia, F., & Oktika, M. (2022). Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Kemiskinan di Kecamatan Medan Perjuangan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 1349–1358.
- Nurhidayat. (2020). Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(1), 17–34.
- Pratama, N., & Utama, M. S. (2019). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 8(7), 651–680.
- Safri, H. (2018). *Pengantar ilmu ekonomi*. Palopo: Lembaga Penerbit Kampus IAIN Palopo.
- Sani, S. R., Fitri, C. D., Amri, K., Muliadi, M., & Ikhsan, I. (2022). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pengangguran, Kemiskinan dan Ketimpangan Pendapatan: Bukti Data Panel di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 6(1), 107–115.
- Setyadi, S., & Indriyani, L. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap peningkatan resiko kemiskinan di Indonesia. *PARETO: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 4(1), 53–66.
- Shakina, D. A. R., Caesaria, S. M., Nasution, P. N. H., & Mutiah, N. F. (2023). Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kabupaten Berau. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(7), 3205–3214.
- Subandi, M. M. (2014). *Ekonomi Pembangunan*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarni, Y. (2020). Pandemi Covid-19: Tantangan ekonomi dan bisnis. *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(2), 46–58.

Susantyo, B., Nainggolan, T., Rahman, A., Erwinsyah, R. G., Irmayani, N. R., Habibullah, H., As' adhanayadi, B., Sugiyanto, S., & Arifin, J. (2020). *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial.

Teja, M. (2020). Permasalahan keakuratan data penerima bantuan sosial Covid-19. *Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis*, 12, 13–18.

KUESIONER

I. Petunjuk Pengisian Kuesioner

Dalam kuesioner penelitian ini diharapkan Bapak/Ibu mengisi semua pertanyaan berdasarkan kondisi sesuai dengan keadaan di lapangan. Untuk pengisian kuesioner pada bagian II dan III, responden diharapkan untuk memberi tanda (√) pada kolom (□) yang sudah disediakan.

II. Identitas Responden

1. Usia : 17 – 25 Tahun
 26 – 35 Tahun
 36 – 45 Tahun
 > 45Tahun
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
 Perempuan
3. Pendidikan : Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)
 Sekolah Dasar (SD)
 Sekolah Menengah Pertama (SMP)
 Sekolah Menengah Atas (SMA/K)

III. Pertanyaan Umum

1. Sudah berapa lama terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ?
 - a. < 1 Tahun
 - b. 1 – 3 Tahun
 - c. 3 – 5 Tahun
 - d. > 5 Tahun
2. Berapa penghasilan Rumah Tangga Setiap bulan ?
 - a. < Rp. 1.000.000
 - b. Rp. 1.000.000 – Rp. 2.500.000
 - c. Rp. 2.500.000 – Rp. 3.500.000
 - d. > Rp. 3.500.000.
3. Jenis Bantuan yang di terima ?
 - a. PKH
 - b. BLT
 - c. Bantuan Sembako

- d. Subsidi Gaji Karyawan
- e. BLT UMKM

IV. Pertanyaan Khusus

Pada bagian ini diharapkan Bapak/Ibu mengisi semua pertanyaan berdasarkan kondisi sesuai dengan keadaan di lapangan. Dimana, pada bagian ini responden dapat memberi tanda (√) pada kolom jawaban yang telah disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Kurang Setuju
- 4 = Setuju
- 5 = Sangat Setuju

No	Pernyataan					
		1	2	3	4	5
1	Bantuan Sosial yang diberikan sudah merata					
2	Puas dengan Bantuan yang diberikan					
3	Bantuan dapat meringankan beban kehidupan masyarakat					
4	Waktu penyaluran sesuai dengan yang beritakan / tepat waktu					
5	Keseuaian yang diterima dengan yang diinformasikan (Nominal)					

HASIL KUESIONER

Usia	Jenis Kelamin	Pendidikan	Bantuan Merata	Kepuasan	Meringankan beban	Tepat Waktu	Nominal Sesuai
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMP	3	1	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4
> 45 Tahun	Perempuan	SD	1	1	4	4	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4
36-45 Tahun	Perempuan	SD	2	2	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4
26-35 Tahun	Perempuan	SD	2	2	5	2	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	4	1	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SD	2	2	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	3	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SD	2	2	5	5	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	4	4	4	4	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	2	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMP	2	2	5	5	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMP	4	4	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	2	2	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	2	2	5	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMP	2	2	4	4	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	3	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	2	2	5	5	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMP	4	4	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	2	2	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMP	4	4	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	3	1	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMP	5	2	5	5	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	3	2	4	4	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	3	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMP	3	3	3	2	4
26-35 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4

> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	2	5	2	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	2	3	3	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	5	2	5	5	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	3	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	5	5	5	5	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	1	4	4	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	2	4	4	4
36-45 Tahun	Perempuan	SMA	3	2	5	5	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4
> 45 Tahun	Perempuan	SMA	3	3	3	2	4